

PERKEMBANGAN DESA PERDIKAN TAWANGSARI KABUPATEN TULUNGAGUNG 1824 – 1905

MAYA WIDYAWATI

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email : mayawidya6@gmail.com

Artono

S-1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Desa Perdikan Tawangsari adalah suatu wilayah di Mancanegara Wetan Kesultanan Mataram yang berstatus Perdikan Mutihan. Berbeda dengan desa perdikan lainnya, wilayah ini memiliki kedudukan yang kuat dikarenakan memiliki Layang Kekancingan dari dua raja Mataram. Sesuai perjalanan waktu desa ini berkembang dan memiliki kedudukan penting dalam proses pembangunan kota Tulungagung. Dalam penelitian ini akan meneliti beberapa permasalahan antara lain: 1) tentang latar belakang terbentuknya desa perdikan Tawangsari; 2) perkembangan wilayahnya masa 1824 hingga 1905; dan 3) kontribusi desa perdikan Tawangsari ini bagi awal perkembangan Tulungagung. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah terdiri dari : 1) Heuristik; 2) Kritik; 3) Interpretasi; 4) Historiografi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) sejarah penetapan desa perdikan Tawangsari yang di terima oleh Kyai Abu Mansur, karena jasanya membantu Pakubuwana II dan Mangkubumi dalam memperoleh kedudukannya sebagai raja Mataram; 2) perkembangan desa perdikan Tawangsari dibagi dalam dua periode. Pertama kebijakan masa Kyai Abu Mansur pada tahun 1824-1870 meliputi tiga aspek yaitu: pembangunan pondok pesantren di perdikan Tawangsari yang meningkat, ikut andil dalam kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Tulungagung dan sebagai pendorong pembangunan pusat kota Tulungagung. Kedua sepeninggal Kyai Abu Mansur masa 1780-1905 terjadinya pembagian wilayah perdikan Tawangsari menjadi 3 yaitu: Tawangsari, Winong dan Majan; 3) kontribusi desa perdikan Tawangsari bagi awal perkembangan Tulungagung mencakup aspek politik, sosial, ekonomi, budaya dan agama.

Kata Kunci : Perkembangan Desa Perdikan, Mutihan, Kontribusi

Abstrak

Desa Perdikan Tawangsari is an area in Mancanegara Wetan of Mataram with status of Perdikan Mutihan. In contrast to other villages, this region has a strong position due to having the Layang Kekancingan from the two Mataram kings. Appropriate travel time this village develops and has an important position in the development process of Tulungagung city. In this research will examine several problems, among others: 1) about the background of Tawangsari perdikan village; 2) the development of its territory from 1824 to 1905; and 3) the contribution of Tawangsari perdikan village of early development Tulungagung. Motede historical research consists of: 1) Heuristics; 2) Criticism; 3) Interpretation; 4) Historiography

The results of the research show that: 1) the history of the determination of the Tawangsari perdikan village received by Kyai Abu Mansur, because his services helped Pakubuwana II and Mangkubumi in obtaining his position as king of Mataram. First he gained the territory of Tawangsari and the Pakubuwana II perdikan status, his second recognition of the territory of perdikan Tawangsari's occupation by Mangkubumi all gave the gift in the form Layang Kekancingan; 2) the development of the village of perdikan Tawangsari is divided into two periods. The first policy of Kyai Abu Mansur period in 1824-1870 covers three aspects, namely: the development of pesantren in pesantren increasing perdikan Tawangsari, contributed to the policy of transfer of Tulungagung government center and as a support of Tulungagung city center development. Secondly after the death of Kyai Abu Mansur 1780-1905 the division of the territory of perdikan Tawangsari into 3 namely Tawangsari, Winong and Majan; 3) the contribution of early development Tulungagung perdikan Tawangsari village to some aspects, among others: politics, social, economy, culture and religion.

Keywords: Development of Village Perdikan, Mutihan, Contribution

PENDAHULUAN

Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar dan memiliki pengaruh yang besar di wilayah Jawa. Wilayah Mataram, awalnya merupakan sebidang tanah yang dihadiahkan oleh Sultan Hadiwijaya (Sultan Pajang) kepada Ki Gede Pemanahan. Sebidang tanah (Alas Mentaok) sebagai tanda balas budi atas keberhasilan Ki Gede Pemanahan membantu Sultan Pajang untuk menyingkirkan Arya Penangsang, yang masa itu keduanya saling memperebutkan tahta dari Kesultanan Demak sepeninggal Sultan Trenggana.¹ Dalam perkembangannya, Mataram sangat cepat berkembang hingga saat dasawarsa terakhir abad ke 16 Mataram berhasil menguasai daerah – daerah di Jawa Tengah, baik pedalaman maupun sepanjang pantai

utara.² Dilanjutkan dengan penguasaan wilayah Jawa Timur ketika masa Sultan Agung yang mencapai puncak kejayaan Mataram. Masa Sultan Agung wilayah Mataram mencakup seluruh Jawa bagian tengah dan timur, dan sebagian Jawa bagian barat (kecuali Banten dan Batavia).

Permasalahan mulai timbul ketika Mataram berambisius ingin menguasai seluruh wilayah Jawa. Beberapa daerah penting diserang untuk dijadikan daerah bawahannya, salah satunya wilayah Surabaya dan Batavia. Apalagi ketika pihak asing mulai ikut memanfaatkan kondisi semacam ini, salah satu pihak yang mengambil bagian dari kepentingan Mataram adalah VOC. Semakin meluasnya pengaruh dari Mataram membuat VOC tertarik dan menjalin hubungannya dimulai masa Sultan Agung. Terlihat dari beberapa peristiwa penting yang dicatat dalam sejarah mulai penyerangan Mataram ke Batavia hingga rukunnya kembali

¹ Darmawijaya, *Kesultanan Islam Nusantara* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm.69.

² H. J. de Graaf dan T. H. Pigeaut, *Kerajaan – kerajaan Islam di Jawa Peralihan Dari Majapahit ke Mataram*, terj. Grafiti Press dan KITLV (Jakarta: Grafiti Press, 1985), hlm, 286.

dengan pihak VOC karena alasan tertentu. Pada masa tersebut pihak asing mulai dapat masuk dan memiliki andil dalam mempengaruhi eksistensi keberadaan Mataram di Jawa.

Hubungan tanah perdikan, Mataram Islam serta Kadipaten Ngrawa dimulai ketika pembukaan wilayah Tawang Sari di Kadipaten Ngrawa. Seorang tokoh bernama Kyai Abu Mansur mendapatkan hadiah berupa tanah di utara wilayah Kadipaten Ngrawa karena jasanya membantu Pakubuwono II dalam mengatasi permasalahan internal di Mataram. Mulai dari beberapa pemberontakan serta perselisihan saudara. Diawali dengan pemberontakan Trunojoyo (1676 – 1678 M), pemberontakan Untung Suropati (1680 – 1710 M) memancing VOC untuk ikut campur dan memanfaatkan situasi.³ Kurang tegasnya penguasa masa itu menjadi salah satu penyebab banyaknya gejolak, sehingga dianggap lemah dan mudah untuk di kudeta oleh beberapa pihak.

Peran kyai Abu Masur saat itu adalah menjadi murid dari Kyai Hasan Beshari yang dimintai bantuan Pakubuwono II untuk membantunya dalam mengatasi kemelut di Mataram. Sehingga perjuangan tersebut membuahkan hasil yang manis, kyai Abu Mansur yang ikut serta diberikan hadiah tanah di Tawang Sari. Setelah memperoleh sebidang tanah dibukalah sebuah pesantren dan dibangun masjid. Daerah yang diberikan oleh Pakubuwono II ini berada dibawah kadipaten Ngrowo namun daerah tersebut belum sebagai daerah perdikan. Baru setelah terjadi perang saudara antara Pakubuwono III dan Mangkubumi dan munculnya perjanjian Giyanti yang memecah Mataram menjadi dua baru hak perdikan diberikan di Tawang Sari dengan status desa perdikan Mutihan yang disertai dengan sebuah surat “Layang Kekancingan”.⁴

Setelah desa perdikan berdiri, semakin berkembangnya syiar Islam di wilayah Tawang Sari, banyak pendatang dari berbagai wilayah sekitar Kadipaten Ngrawa datang dan singgah untuk menimba ilmu agama yang lebih mendalam di pesantren wilayah Tawang Sari. Selain hal itu tradisi – tradisi mataraman masih kental terasa di wilayah Tawang Sari. Setiap perayaan hari-hari besar agama Islam selalu diadakan perayaan baik meliputi grebek ataupun sekedar tasyukuran. Ditambah dengan hak khusus dalam hal pernikahan yang dapat diurus oleh kyai – kyai di desa Tawang Sari tanpa harus mencari perantara lainnya.⁵ Disamping itu juga banyak bantuan dan sokongan yang dilakukan oleh para warga perdikan desa Tawang Sari untuk kesejahteraan kadipaten Ngrowo hingga berubah menjadi Kabupaten Tulungagung sampai saat ini. Mulai dari pembangunan infrastruktur sampai ide atau gagasan untuk memajukan wilayah Tulungagung itu sendiri. Kontribusi itu sendiri dilakukan pada beragam aspek kehidupan antara lain, dalam aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Seiring perjalanan waktu perkembangan dari wilayah Perdikan Tawang Sari ini mengalami beberapa peristiwa yang menarik untuk diteliti lebih mendalam.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mengangkat judul “Perkembangan Desa Perdikan Tawang Sari bagi Tulungagung 1824- 1905”. Rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya desa Perdikan Tawang Sari Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana perkembangan wilayah Perdikan Tawang Sari Kabupaten Tulungagung 1824 -1905?
3. Bagaimana kontribusi desa Perdikan Tawang Sari bagi perkembangan awal Tulungagung hingga 1905?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis latar belakang terbentuknya desa Perdikan Tawang Sari Kabupaten Tulungagung

2. Untuk menganalisis perkembangan desa Perdikan Tawang Sari Kabupaten Tulungagung 1824 - 1905
3. Untuk menganalisis kontribusi desa Perdikan Tawang Sari bagi perkembangan awal Tulungagung hingga 1905

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang bersifat sistematis dan digunakan untuk menguji atau melaksanakan suatu penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji penelitian mengenai “Perkembangan Desa Perdikan Tawang Sari Kabupaten Tulungagung 1824 - 1905 ” yaitu Metodologi Sejarah dengan cara menganalisis peristiwa masa lampau yang terjadi denag melalui beberapa proses tahapan. Metode ini merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, yang terdiri dari beberapa proses tahapan.

Metode penelitian sejarah merupakan suatu langkah dalam menggambarkan peristiwa-peristiwa pada masa lalu berdasarkan analisis peneliti. Melalui metode penelitian sejarah, peneliti hendaknya berhati-hati dalam menarik kesimpulan dan harus didukung dengan bukti-bukti sejarah, agar tidak menimbulkan efek subyektifitas dalam tulisannya.⁶ Menurut Kuntowijoyo, dalam penulisan dengan menggunakan metode sejarah ada lima tahapan atau langkah, antara lain: pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber atau verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), interpretasi (analisis dan sintesis), dan penulisan (historiografi). Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai lima langkah penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo yang juga dilakukan oleh peneliti:

1. Pemilihan Topik

Pemilihan topik merupakan langkah awal yang dibutuhkan dalam proses penulisan sejarah. Dalam pemilihan topik dianjurkan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan dalam proses penelitiannya.

2. Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Pengumpulan sumber (Heuristik) adalah suatu proses kegiatan mencari, mengumpulkan atau menemukan sumber- sumber sejarah untuk menunjang keberadaan data-data yang konkret. Sumber sangat menentukan kualitas penulisan sejarah agar menghasilkan karya yang memiliki nilai akurat, autentik dan kredibilitas yang tinggi.

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data dan sumber yang relevan mengenai judul yang akan diteliti ,yaitu “Perkembangan Desa Perdikan Tawang Sari Kabupaten Tulungagung 1824 - 1905”. Sumber penelitian ini diperoleh dari Perpustakaan Daerah Tulungagung, Perpustakaan Masjid Al-Munawar dan Tawang Sari, Wawancara dengan pihak terkait, serta beberpa dinas yang terkait. Disamping itu juga di dukung Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Jawa Timur, serta Perpustakaan beberapa Instansi Pendidikan lainnya.

3. Kritik Sumber atau Verifikasi

Tahapan selanjutnya setelah pengumpulan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam penelitian adalah kritik sejarah untuk meverifikasi keabsahan sumber. kritik sumber merupakan usaha dalam mengolah dan menyaring sumber-sumber yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Kritik sumber dibagi menjadi dua yaitu kritik intern dan ekstern.⁷

4. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran adalah sebuah proses yang digunakan untuk kepentingan penafsiran fakta- fakta sejarah serta bagaimana proses sistematiak penyusunannya. Pada tahapan ini, peneliti dituntut cermat dengan data yang telah diperolehnya agat tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran. Bagi seorang sejarawan yang jujur mestinya akan mencantumkan data dan keterangan dari mana dia mendapatkan data itu, sehingga orang lain dapat melihat

³ _____. *Babad Trunojoyo -Suropati*, terj. Balai Pustaka, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 53.

⁴ Tim Peneliti Sejarah, *Sejarah dan Babad Tulungagung*. (Tulungagung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1971), hlm. 91.

⁵ Ibid, hlm. 13

⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang, 2005), hlm. 65

⁷ Gde Widja, *Sejarah Lokal suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, 1989), hlm. 24.

sendiri dan menafsirkannya kembali dengan pemahamannya.⁸

5. Penulisan (Historiografi)

Historiografi adalah sebuah rangkaian paparan, penggambaran, presentasi atau sebuah eksplanais penjelasan.⁹ Hasil dari adanya historiografi ini yang akan menjelaskan rekonstruksi sejarah yang masih tetap ada walaupun peristiwanya telah lama berlalu. Pada tahapan ini peneliti harus memperhatikan gaya penulisan dan penyajian, agar hasil penulisan sejarah dapat dipercayai oleh pembacanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Terbentuknya Desa Perdikan Tawang Sari di Tulungagung

Tanah Perdikan merupakan tanah yang bebas merdeka (berasal dari bahasa Sansekerta *Maharddhika*) yang memiliki arti berkuasa sendiri atau mengatur dirinya sendiri. Kemerdekaan atau kebebasan tersebut tidak mutlak atau seratus persen didapatkan melainkan tetap ada ikatan dengan kuasa serta wewenang raja dan masih dibawah kontrol pihak kerajaan, baik langsung maupun tidak langsung.¹⁰ Istilah tanah Perdikan atau Sima pertama kali ditemukan di dalam sebuah prasasti Dieng bertahun 731 saka atau 809 M. hingga dari masa ke masa sampai jaman kerajaan Majapahit, status tanah Perdikan masih terus dikeluarkan oleh para raja serta pejabat tinggi kerajaan. Tradisi tersebut masih diteruskan hingga masa Mataram akhir yang diakui keabsahannya oleh pemerintah Belanda, salah satunya Tulungagung yang masa itu masuk dalam karisidenan Kediri. Awalnya wilayah Tulungagung merupakan daerah Sima dari kerajaan Kadiri yang dikeluarkan pada masa pemerintahan raja Srenggo atau Kertajaya yang menetapkan beberapa desa di tanah Tulungagung bagian selatan sebagai tanah Sima atas jasanya terhadap Kadiri salah satunya desa Thani Lawadan.

Tradisi tersebut hingga Mataram Islam sangat banyak dijumpai tradisi pemberian tanah-tanah bebas pajak (Perdikan atau Sima) di beberapa wilayah bawahannya, salah satunya adalah desa Tawang Sari. Wilayah Tawang Sari disahkan menjadi desa Perdikan ketika tokoh ulamanya yang bernama Kyai Abu Mansyur membantu Mangkubumi dalam menduduki jabatan menjadi raja di Mataram. Sebelum Mangkubumi, Pakubuwono II memberikan hak sebidang tanah di wilayah mancanegara wetan untuk Abu Mansyur sebagai tanda balas jasa. Perintah dari kedua raja Mataram tersebut dilegitimasi oleh sebuah layang kekancingan yang menjadikan desa Tawang Sari sebagai desa Perdikan Mutihan, dalam artian di wilayah tersebut merupakan salah satu pusat pendidikan agama islam di wilayah mancanegara wetan dibawah kekuasaan Mataram masa itu. Sehingga keberadaan serta kedudukan Tawang Sari sangat erat kaitannya dengan perkembangan islam kerajaan Mataram di wilayah Tulungagung.

Sesuai dengan fakta dan kronologis peristiwa sejarah, ada tiga perang besar dalam peralihan tahta kekuasaan Mataram Islam. Ketiga perang tersebut dalam masyarakat Jawa terkenal dengan sebutan “Perang Suksesi” atau Perang Tahta, yang terdiri dari :

1. Perang Suksesi Jawa I (1704 – 1708), antara Amangkurat III melawan Pakubuwana.
2. Perang Suksesi Jawa II (1719 - 1723), antara Amangkurat IV melawan Pangeran Blitar dan Pangeran Purbaya.
3. Perang Suksesi Jawa III (1747 - 1757), antara Pakubuwana II yang dilanjutkan oleh Pakubuwana III melawan Hamengkubuwono I dan Mangkunegara I.

Ketiga perang yang terjadi dalam perebutan kekuasaan Mataram menyebabkan kekacauan serta perpecahan pada pemerintahan serta masyarakat Jawa (Mataram). Ditambah dengan ikut terlibatnya Belanda (VOC) dalam politik istana,

merupakan cikal bakal konflik antar bangawan Mataram yang merujuk pada perebutan tahta hingga perang saudara. Banyak para pangeran yang secara terpaksa keluar keraton untuk melakukan kudeta pada raja yang berkuasa. Perang saudara yang terjadi cukup lama di Mataram mengakibatkan stabilitas politik dan keamanan kacau, ditambah dengan mahalanya biaya perang yang dikeluarkan sehingga menimbulkan hutang yang berlipat ganda dengan bunga yang sangat besar kepada VOC. Keadan ini terus menurun terjadi seiring pergantian tahta Mataram sehingga secara tidak sengaja menjadikan posisi VOC sangat kuat mendominasi wilayah Mataram.

Perdikan Tawang Sari yang berada di wilayah Kabupaten Ngrowo berdiri ketika suasana politik dalam istana Mataram memanas akibat perebutan kekuasaan (Perang Suksesi II dan Perang Suksesi III), pada masa pemerintahan Amangkurat IV di Mataram. Awalnya wilayah Kabupaten Ngrowo hanyalah berupa katemenggungan Wajak yang merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Mataram. Wilayah ini kemudian berubah status menjadi Kabupaten setelah Perang Suksesi I pada tahun 1709. Kyai Ngabehi Mangundiriono yang ditunjuk sebagai bupati Ngrowo. beliau menjabat sebagai bupati diperkirakan hingga pada masa pemerintahan Amangkurat IV (1709-1726).

Gejolak yang terjadi di wilayah Mataram menjadi salah satu latar belakang berdirinya Desa Perdikan Tawang Sari. Dalam perkembangan sejarahnya perdikan Tawang Sari menyimpan sejarah tokoh keturunan Mataram dalam mengembangkan dakwah Islam dan perjuangan melawan penjajah Belanda (VOC). Sehingga selain dikenal sebagai pusat penyebaran dakwah Islam di Kabupaten Ngrowo, Perdikan Tawang Sari juga merupakan basis perlawanan terhadap kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda.

B. Perkembangan Wilayah Perdikan Tawang Sari Di Tulungagung 1824- 1905

1. Kebijakan Masa Abu Mansur 1824 –1905

a) Pembangunan Pondok Pesantren di wilayah Tawang Sari

Wilayah Tawang Sari merupakan kawasan yang memiliki lembaga pendidikan Islam berupa pondok pesantren yang beragam. Tak lepas dari sejarahnya yang menyebutkan wilayah ini dulunya merupakan pusat perkembangan agama Islam di Wilayah Tulungagung dan sekitarnya. Ketika pertama kalinya Kyai Abu Mansur datang ke wilayah Tawang Sari sekitar abad ke 18. Ketika kedudukannya di wilayah Tawang Sari telah mendapatkan dukungan dari beberapa pihak menjadikan beliau memantapkan dirinya untuk mulai berdakwah dan menyebarkan agama Islam di wilayah Tawang Sari. Kedatangannya ke Tawang Sari disambut baik oleh masyarakat setempat yang sudah ada terlebih dahulu menempati wilayah tersebut, alasan utamanya dikarenakan kepribadian beliau yang luhur menjadikan daya tarik tersendiri yang membuat masyarakat menerima dakwah dan ajarannya secara terbuka. Masyarakat menganggap Kyai Abu Mansur sebagai seorang panutan, penyelamat serta pelindung bagi mereka. Disamping hal itu tokoh seperti Kyai Abu Mansur dianggap mumpuni dan dapat dijadikan rujukan atau tempat masyarakat berkonsultasi mengenai masalah keagamaan ataupun pertolongan lainnya yang bersifat magis serta hal- hal lainnya.

Sang Kyai juga terkenal akan kesaktiannya, selain mengajarkan ilmu tentang agama kebanyakan para santrinya yang mondok juga dibekali dengan ilmu kanuragan yang bertujuan untuk menghidupkan jiwa perjuangan melawan penjajah Belanda (VOC). Tawang Sari masa itu terkenal sebagai wilayah yang memiliki banyak pendekar hebat yang ditakuti oleh penjajah Belanda. Pembangunan Masjid Tawang Sari menjadi awal penyebaran agama di wilayah tersebut sekitar tahun 1750 M. Setelah selesainya

⁸ Kuntowijoyo, *op.cit.* hlm. 102.

⁹ Ibid, hlm 100-102

¹⁰ Machi Suhadi. “Status Tanah/ Desa Perdikan di Jawa: Suatu Catatan dari Sumber Prasasti Kuno”. (Majalah Analisis Kebudayaan,

Tahun II, Nomor 1, 1981/1982, hlm 131. Diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan)

pembangunan masjid dilanjutkan dengan sebuah pondok pesantren yang masih tradisional. Adanya satu pondok pesantren ini menjadi cikal bakal tumbuh dan berkembangnya beberapa pondok pesantren di wilayah Tawang Sari mulai tahun 1824 dengan sistem yang lebih kompleks. Awalnya pondok serta masjid yang dibuat hanya untuk tempat persinggahan orang-orang yang mau berguru mendalami ilmu agama dan kanugrahan, masa itu masih dikenal dengan adanya istilah Padepokan. Seiring berjalannya waktu muncul pondok-pondok pesantren sejenis yang didirikan oleh beberapa saudara atau anak keturunan dari Kyai Abu Mansur.

b) Pemindahan Pusat Kota Kabupaten Tulungagung

Belum banyak yang tahu mengenai pusat pemerintahan kabupaten Tulungagung yang awalnya bukan berada di posisinya saat ini. Letak awal ibu kota dari Tulungagung yang pertama berada di wilayah Kalangbret kecamatan Kauman, namun bentuknya masih berupa sebuah Kadipaten yang dikenal dengan nama "Ngrowo". Bekas wilayah pusat pemerintahan Tulungagung tempo dulu ini sampai saat ini tidak kalah ramai dengan pusat kota yang baru.

Peristiwa perpindahan pusat pemerintahan tersebut terjadi ketika masa pemerintahan Bupati Tulungagung ke 3 yaitu R.M Mangoenegoro sekitar tahun 1824. Mataram Islam ketika dipimpin oleh Pakubuwana I dan VOC mengadakan perjanjian mengenai nama Kalangbret tetap digunakan sebagai inukota Kadipaten Ngrowo tahun 1709. Sama halnya disebutkan dalam perjanjian Giyangti nama Kalangbret merupakan salah satu wilayah yang berada diposisi mancanegara jauh berada diluar wilayah ibukota Mataram di Yogyakarta. Wilayah Kalangbret tersebut dijadikan ibukota Kadipaten Ngrowo dari tahun 1750 hingga 1824 Masehi, yaitu mulai dari masa Mataram Islam hingga masa kolonial. Jauh sebelumnya nama Kalangbret dikenal sejak tahun 1255 M dalam prasasti Mula-Malurung dan Negarakertagama.

Sebelum munculnya kadipaten Ngrowo di wilayah Tulungagung, di sebelah selatannya sudah berdiri sebuah Katumenggungan Wajak pada masa kepemimpinan Sultan Agung di Mataram. Ketika masa peralihan kekuasaan dari R.M Mangoenegoro ke K.R.T. Pringgodingrat, ibukota kadipaten dipindahkan ke sebelah timur sungai Ngrowo. Perpindahan tersebut dilakukan atas saran dari Kyai Abu Mnasur dan para sentana wilayah Tawang Sari, dikarenakan posisi ketika masa di Kalangbret dinilai tidak strategis. Posisi di Kalangbret dinilai berada dipinggiran barat wilayah Tulungagung, sehingga lebih diarahkan ke timur untuk mencapai posisi tengah agar semua wilayah bawahan kadipaten atau desa-desa dapat secara adil mengakses wilayah ibukota kadipaten. Hal lain yang melatarbelakangi perpindahan tersebut karena adanya keinginan para sentana yang pada saat itu merupakan tokoh yang nasehatnya sangat dipercaya dan didengar oleh pemimpin Ngrowo. Pada tahun 1896 anma Tulungagung dipakai sebagai salah satu distrik dalam wilayah Kadipaten Ngrowo atas kebijakan pihak kolonial. Pada tanggal 1 April 1901 ketika masa pemerintahan R.T Partowijoyo nama Ngrowo berubah menjadi Tulungagung.

Hingga saat ini wilayah Kalangbret masih banyak ditemukan bangunan bekas sisa pemerintahan yang secara tidak langsung beralih fungsi. Pendopo bekas Kadipaten Ngrowo sekranag beralih fungsi menjadi kantor Kecamatan Kauman. Didepan Kantor kecamatan Kauman ada tanah lapang yang dulunya merupakan alun-alun dari Ngrowo yang beralih fungsi menjadi lapangan bola dan sekarang menjadi Taman Ketandan.

c) Pembangunan Pusat Kota Tulungagung

Pendirian pusat kota Tulungagung dimulai sekitar tahun 1824 tidak lepas dari bantuan serta saran Kyai Haji

Abu Mansur selaku kepala desa perdikan Tawang Sari pada masa tersebut. Beliau menghimpun para santri serta pengikutnya untuk terlibat dalam proses pembangunan pusat kota Tulungagung. Tidak dipungkiri Tulungagung yang sebelumnya bernama Ngrowo, sesuai dengan namanya merupakan sebuah daerah berupa rawa-rawa. Segala aktivitas utamanya transportasi menggunakan aliran sungai Ngrowo yang membentang disepanjang pusat kota Tulungagung.

Dalam tutur lisan ataupun ditulis dalam beberapa versi menyebutkan bahwa sebelum menjadi Kabupaten Tulungagung, Ngrowo adalah sebuah daerah yang masih dikuasai oleh para Tumenggung dibawah wewenang Raja Mataram. Kemudian beberapa katemenggungan ini digabungkan menjadi satu membentuk sebuah kadipaten atau kabupaten yang baru. Setelah perangkat serta pejabat pemerintahan kabupaten terbentuk tentunya sebuah pemerintahan membutuhkan tempat yang strategis sebagai pusat menjalankan roda pemerintahannya. Disepakati untuk membangun kediaman Bupati beserta alun-alun, awalnya berada di wilayah Kalangbret dan akan dipindahkan di Ringinpitu namun karena tidak mencapai kata mufakat pembangunan urung dilaksanakan.

Dari sinilah muncul peran Abu Mansur yang merupakan tokoh penting dari sekitar wilayah tersebut. Beliau menghimbau Bupati agar meminta petunjuk langsung dari Keraton Mataram. Diberikanlah pencerahan agar membangun kota Kabupaten di wilayah utara Wajak serta harus berada disebelah timur aliran Sungai Ngrowo.¹¹ Namun sayangnya kendala yang dihadapi kemudian wilayah yang dimaksudkan oleh Raja merupakan sebuah tempat yang terdapat sumber air besarnya serta berada di wilayah yang rendah. Petunjuk dari Mataram menegaskan bahwa sumber air besar tersebut mula-mula harus disumbat menggunakan pohon beringin dari Mataram. Akhirnya pembangunan dimulai tahun 1824 dengan pembangunan alun-alun terlebih dahulu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Nyai Fatimah selaku keturunan ke 6 dari Kedaton Tawang Sari dipaparkan tentang Kyai Abu Mansur yang ditugasi membendung air yang menggenangi wilayah alun-alun dengan menanam pohon beringin Mataram. Oleh masyarakat sekitar pohon beringin yang ditanam di alun-alun disebut Ringinkurungkarena disekelilingnya diberi pagar tembok.

Selain itu pembuatan skema aliran air yang nantinya akan mengalirkan air yang ada dikawasan sekitar alun-alun dialirkan melalui Kali Jenes menuju Sungai Ngrowo.

"Di tengah alun-alun terdapat pohon beringin besar yang diambil dari Keraton. Ringin besar diberi nama Ringinkurung karena disekitarnya dipagari. Dengan adanya pohon beringin ini air yang ada di pusat kota mampu disrap, selain itu disebelah alun-alun dibuat salura air yang mengarah ke Kali Jenes "

Ketika itu Abu Mansur menyumbat sumber air dengan menggunakan tujuh batang pohon beringin yang didapatnya dengan mencabut dikawasan Ringinpitu. Sejak disumbatnya sumber air besar tersebut secara lambat laun wilayah rawa-rawa berubah menjadi daratan yang kering.

Pada masa pemerintahan K.R.T Pringgodingrat bupati Ngrowo yang menjabat tahun 1824-1830 pembangunan pusat pemerintahan dan alun-alun mulai dibangun. Sebagai tanda pembangunan tersebut adalah candrasengkala memet yang terdapat pada sepasang arca Dwarapala yang dipasang diempat penjuru kota Tulungagung hingga saat ini. Candrasengkala tersebut berbunyi : " Dwi Rasekso Sinabdo Ratu yang merujuk angka 1752 Saka atau 1824 Masehi. Nama kabupaten Ngrowo kemudian diubah menjadi Tulungagung padamasanya pemerintahan bupati Ngrowo ke 11 R.T Partowijoyo tahun 1901, perubahan tersebut disertai Besluit Gubernur Hindia Belanda Nomor 8 tertanggal 14 Januari 1901.

¹¹ R. Isdojo, *Sejarah dan Babad Tulungagung Edisi Revisi*, (Tulungagung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tulungagung, 2004), hlm. 86-87

Konsep pembangunan alun-alun Tulungagung mengadopsi gaya klasik penataan kota dari masa Majapahitan hingga Mataraman yang secara turun temurun masih dipakai. Keberadaan alun-alun selalu menjadi bagian dari kompleks keraton. Keraton dalam kehidupan masyarakat Jawa selalu identik dengan pusat pemerintahan serta pusat kebudayaan. Alam kepercayaan masyarakat Jawa, manusia yang religius biasanya membagi ruang menjadi dua jenis yakni ruang homogen atau sakral dan ruang yang inhomogen atau tidak teratur. Dalam sakral segalanya teratur baik tingkah laku manusianya maupun struktur bangunannya. Sedangkan di ruang inhomogen semuanya tidak teratur, karena belum disucikan.¹²

Konsep merupakan dasar awal dasar pembangunan alun-alun Tulungagung pertama kali dicetuskan oleh Kyai Abu Mansur. Dengan alasan wilayah ini masih merupakan salah satu kekuasaan Mataram dulunya serta pengaruh mataram kuat maka secara otomatis gaya atau konsep yang digunakan dalam pembangunan pusat pemerintahannya mengadaptasi gaya mataraman. Tipologi ibukota kabupaten di Jawa memiliki tata kota yang didominasi oleh alun-alun yang berada dipusat kota. Pada bagian utara dan selatan pada kedua ujung alun-alun merupakan kediaman asisten residen dan bupati yang saling berhadapan, sedangkan disebelah barat terletak masjid dan di timur adalah penjara. Susunan kota mataram masih nampak jelas pada bangunan kota Tulungagung. Susunan bangunannya meliputi kaputren, taman sari, paseban, siti inggil, tempat kereta, alun-alun dengan pohon beringin, masjid di sisibarat alun-alun dan kantor pos sebelah selatan masjid.

Berdasarkan denah alun-alun Ngrowo tahun 1824 yang dibangun atas perintah R.M.T Pringgodingrat, alun-alun tradisional Jawa selalu terkait dengan keberadaan bangunan-bangunan public disekitarnya dalam konsep *Catur Gatra Tunggal*. Pengaruh kosmologi warisan Hindu ikut membentuk komposisi struktur alun-alun Ngrowo yang menentukan pembagian zona utara dan selatan. Di zona barat dan timur terdapat masjid dan penjara, konsep tersebut menggambar arah barat merupakan simbol kebaikan dan kebalikannya arah timur simbol keburukan.

Sekitar tahun 1847 R.M.T. Jayaningrat bersama rakyat mendirikan masjid kota yang lebih besar. Tujuannya adalah untuk menghidupkan jiwa perjuangan rakyat Ngrowo. Selain sebagai kelengkapan susunan tata letak kota kabupaten, bangunan masjid ini diharapkan menjadai sarana berkumpulnya para ulama, kyai dan santri di Tulungagung dan sekitarnya. Dibelakang Jayaningrat ini ada ulama besar pendorong yang memberikan idenya untuk pembangunan tempat ibadah tersebut, tidak lain adalah Kyai Abu Mansur dan beberapa ulama setempat lainnya. Beliau menghimpun masyarakat perdikan untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan masjid Tulungagung.

Adapun sumbangsih Kyai Abu Mansur terhadap kadipaten Ngrowo atau Tulungagung dapat disimpulkan sebagai berikut: Beliau telah berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam di kadipaten Ngrowo, khususnya wilayah Tawang Sari, Winong dan Majan. Ketiga desa tersebut sejak dulu hingga sekarang lebih dikenal sebagai daerah santri. Benda- benda purbakala peninggalan beliau baik yang berupa bangunan masjid sampai saat ini masih bisa disaksikan walaupun sudah mengalami beberapa kali renovasi. Beliau juga membekali ilmu kanuragan kepada masyarakat ketiga desa untuk melawan penjajah Belanda. Kontibusinya yang paling besar adalah beliau sebagai ulama menjadi penasihat atau penuntun para pemimpin- pemimpin atau bupati untuk menjalankan roda pemerintahannya dengan baik hingga berjasa besar pada proses pembangunan kota Tulungagung secara utuh.

2. Kebijakan Sepeninggal Abu Mansur 1870 – 1905

a) Pembagian Wilayah Perdikan

Menurut riwayat yang berkembang, kehidupan Kyai Abu Mansur diakhiri dengan kepergiannya ke tanah suci Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji namun beliau

meninggal saat melaksanakan ibadah haji disana. Beliau dimakamkan di Baqi wilayah Arab.

Kyai Abu Mansur mempunyai nama asli R.M Tala (versi Surakarta) atau R.M Kala (versi Yogyakarta) merupakan putra dari Raja Kasultanan Mataram Islam, Prabu Amangkurat IV (Amangkurat Jawi / R.M Suryaputra), dari selir Mas Ayu Ranggawita (Raden Ayu Bandandari putrid Pangeran Cendana Kudus). Beliau memiliki nama kecil Raden Qosim, beliau mendapat gelar Diponegoro oleh Pakubuwana II, sehingga namanya menjadi R.M Tala/ R.M Kala Diponegoro. Perlu dicatat bahwa Diponegoro merupakan salah satu gelar kepangeranan yang disandang oleh para putra raja kerajaan Mataram Islam, baik Mataram Yogyakarta maupun Surakarta. Pasca perang Jawa gelar Diponegoro tidak lagi dipakai sebagai salah satu gelar kepangeranan.

Ketika muda R.M Tala dihadapkan pada keadaan politik Mataram yang tidak stabil, oleh karenanya dia lebih memilih meninggalkan kehidupan istana dan lebihmemperdalam ilmu agama di pondok pesantren Kyai Ageng Hasan Besari di Tegalsari Ponorogo. Ketika berguru di Tegalsari beliau memakai nama kecilnya yakni R.Qosim dan menyembunyikan identitas aslinya. Raden Qosim merupakan santri yang istimewa karena kecakapan serta kepandaianya dalam menyerap ilmu- ilmu yang diberikan oleh Kyai Hasan Besari. Setelah pendidikannya selesai beliau tidak langsung kembali ke Kartasura, tetapi memilih mengembangkan ajaran Islam.

Atas saran dari Kyai Hasan Besari setelah dirasa mempunyai bekal ilmu yang cukup, disertai dengan jiwa kemandiriannya Raden Qosim diarahkan menyebarkan Agama Islam ke wilayah sebelah timur Ponorogo tepatnya di Ngrowo yang kemudian daerah yang ditempatinya diberi nama Tawang Sari. Dari sinilah tonggak penyebaran agama Islam di Tulungagung berawal dan seiring dengan perkembangan Tawang Sari sebagai pusat penyebaran Islam wilayah Ngrowo dan sekitarnya. Raden Qosim mendapatkan gelar Abu Mansur dari sang Guru Kyai Ageng Hasan Besari. Tak lama setelah mendapat gelarnya Raden Qosim (Abu Mansur muda) dijodohkan dengan RA. Fatimah atau yang lebih terkenal dengan julukan Nyai Lidah Item, putri dari Kyai Bagus Harun Basyariah dari Sewulan Madiun. Kyai Bagus Harun Basyariah ini juga merupakan murid dari Kyai Hasan Besari, beliau juga seorang ulama tersohor di wilayah Madiun. Bersama RA. Fatimah atau Nyai Lidah Item ini Abu Mansur memiliki 4 orang anak yaitu : Kyai Yusuf Martontanu yang nantinya akan mewarisi Tawang Sari, Nyai Haji Ilyas nantinya berkedudukan di Winong, Nyai Muhsin dan Nyai Jodikromo.

Setelah wafatnya Kyai Abu Mansur tanpa meninggalkan wasiat ataupun pesan ini terjadi kekosongan pemimpin selanjutnya dikarenakan anak pertamanya Kyai Yusuf Matontanu belum cukup siap dalam memimpin wilayah seluas perdikan Tawang Sari seorang diri. Ketidakstabilan ini membuat beberapa pihak yang memanfaatkan kesempatan untuk dapat ikut menikmati kekuasaan yang selama ini dipegang oleh Kyai Abu Mansur. Maka mulai tahun 1870 ketika tak ada kabar ataupun isyarat kepulangan dari sang Kyai terjadilah beda pendapat dalam menjalankan roda pemerintahan Perdikan Tawang Sari. Muncul nama- nama pihak yang menginginkan haknya untuk dapat menjadi seorang pimpinan. Sehingga membawa perdikan Tawang Sari parda perpecahan. Akhirnya setelah para sentana dan pemegang hak waris dikumpulkan mengadakan musyawarah agar tidak terjadi perebutan kekuasaan memutuskan untuk secara bertahap membagi wilayah perdikan Rencana pembagian wilayah tersebut pada masa itu hanya dilakukan dengan tata cara agama Islam tanpa adanya pencacatan yang lengkap. Wilayah perdikan Tawang Sari yang semula seluas 101 Ha dibagi menjadi 3 bagian namun dalam takaran yang berbeda. Berikut pembagiannya:¹³

¹² M.Eliande, Deliar Noer (Ed), *The Sacred and The Profan*, (Jakarta: CV.Rajawali,1959), hlm. 65

¹³ Hasil wawancara Sentana Tawang Sari

- 1) Berkedudukan di Tawang Sari di dapatkan oleh Kyai Yusuf Martontanu seluas 35 Ha sebagai anak laki-laki pertama dari keturunan Abu Mansur dan Nyai Lidah Item
- 2) Berkedudukan di Winong didapatkan oleh Nyai Haji Ilyas seluas 21 Ha sebagai anak kedua namun dalam pengembangannya kepimimpinanya di pegang oleh suaminya yaitu Kyai Ilyas
- 3) Berkedudukan di Majan didapatkan oleh Kyai Khasan mimbar yang merupakan penghulu utama di Tawang Sari ketika Abu Mansur masih hidup. Beliau merupakan saudara atau keponakan dari Nyai Lidah Item. Kyai Khasan mimbar merupakan keturunan patih Mataram P.A Danuredjo yang kawin dengan Kanjeng Ratu Angger putera puteri dari Roro Mirah yang menjadi permaisuri raja. Beliau mendapat wilayah yang paling luas 45 Ha karena emamng dulunya sebelum Kyai Abu Mansur meninggal sudah diberikan hak di Majan untuk mengurus aspek pernikahan dan sejenisnya.

C. Kontribusi Desa Perdikan Tawang Sari Bagi Perkembangan Tulungagung

1. Aspek Politik

Hubungan antara legitimasi agama para penguasa dengan model otonomi wilayah yang dianugerahkan kepada para rohaniawan jika ditarik ke belakang merupakan sebuah warisan turun temurun dari masa ke masa sejak awal sistem monarki terbentuk di kawasan Nusantara. Dipelopori ketika Hindu- Budha masuk hingga masa akhir islam dan bahkan sampai saat ini beberapa warisan sistem politik mereka masih tetap dapat beradaptasi dengan baik seiring perkembangan zaman. Para penguasa biasanya memberikan tanah yang menjadi milik otonom kepada para rohaniawan (*sima swatantra*) dengan status bebas pajak atau tanah bebas (*dharmas lepa*). Struktur sosial pada masa Hindu-Budha meliputi : kaum rohaniawan menguasai desa- desa bebas pajak, lingkungan keraton yang berkuasa atas raka lokal, desa- desa biasa yang dipungut pajak melalui para perantara pemungut pajak (mangilala drwya haji) yang dapat dianugerahkan tanah lungguh. Pada perkembangannya, sima swatantra atau biasanya disebut sima seringkali berkembang lebih pesat terutama pada saat pusat kota kerajaan runtuh. Pada saat pengaruh islam mencapai daerah pesisir utara Jawa, sima menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Sistem yang dinamakan Perdikan muncul dengan definisi yang sama persis dengan sima yaitu wilayah bebas pajak pemberian Raja, hal ini merupakan sebuah kelanjutan dari sistem sima swatantra yang terus bertahan hingga abad ke 20 M.¹⁴

Sentana merupakan sebutan bagi pemilik tanah atau penguasa yang diberikan wewenang atas tanah perdikan. Hak atas tanah dikelola oleh *sentana* yang menduduki wilayah masing- masing. Bagi pendatang baru yang notabene bukan sentana hanya boleh menumpang, hal tersebut memiliki atrian para pendatang tersebut boleh menggarap tanah namun tidak berhak menguasainya. Para pendatang tersebut yang memasuki kawasan Perdikan biasa disebut "*magersari*". Pada mulanya, luas wilayah perdikan yang dikuasai oleh Abu Mansur hampir meliputi seluruh wilayah "kota" Tulungagung. Pada masa *Gubernemen* wilayah ini diciutkan menjadi sekitar 1,01 km². Kebanyakan penduduk yang diperbolehkan tinggal di kawasan perdikan Tawang Sari hanya bersuku Jawa dan beragama Islam. Dengan kata lain sistem pengelompokan masyarakat pada masa itu mulai tersusun. Disamping itu unsure politik yang sangat kuat dipegang oleh para *sentana* yang secara turun temurun menjadi bupati wilayah Ngrawa atau Tulungagung. Sehingga secara garis besar kepemimpinan wilayah Ngrawa masa itu dipegang kuat oleh para *sentana* wilayah Tawang Sari. Terbukti dengan adanya beberapa keturunan dari *sentana* wilayah Tawang Sari dan sekitarnya tidak pernah absen mengisi kedudukan sebagai Bupati Ngrawa (Tulungagung), sehingga mayoritas masyarakat

mempercayai keturunan Tawang Sari merupakan keturunan yang istimewa. Para *sentana* desa perdikan Tawang Sari memiliki hak khusus dalam segala urusan pengambilan keputusan pemerintahan kadipaten Ngrawa hingga awal mula terbentuknya Kabupaten Tulungagung, suara dari tokoh- tokoh masyarakat sentana sangat dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan hingga saat ini.

2. Aspek Sosial

Urusan pemerintahan bukan hanya semata- mata mengenai kegiatan yang berkaitan dengan pajak dan politik penentuan kebijakan pemerintah, namun di dalamnya tak lepas juga dari aspek sosial dan hukum salah satunya mengenai urusan pernikahan. Di dalam lingkup wilayah desa perdikan adanya masalah pernikahan maupun perceraian diatur sendiri dalam birokrasi setempat. Para pemegang kekuasaan desa perdikan atau para sentana merupakan keturunan dari Kyai Abu Mansur saling bersaing dalam berebut kekuasaan. Sekitar mulai tahun 1860 hingga mencapai puncaknya tahun 1905, Kademangan Tawang Sari terpecah menjadi 3 desa perdikan, yang meliputi : Tawang Sari, Majansari (Majan) dan Winongsari (Winong). Suasana semacam ini mulai berkecamuk ketika meninggalnya Kyai Abu Mansur hingga penyelesaiannya dengan menggunakan jalan pemecahan wilayah perdikan Tawang Sari menjadi 3 untuk dibagi rata kepada anak keturunannya. Mulai tahun 1860 kebimbangan dan kegelisahan sudah terjadi di wilayah Tawang Sari karena kehilangan sosok yang menjadi panutan di wilayah Perdikan Tawang Sari hingga dilanjutkan peristiwa perebutan kekuasaan oleh para keturunan sentana perdikan.

Setelah perpecahan wilayah yang dialami oleh Desa Perdikan Tawang Sari menjadi 3 desa, masing- masing desa dikepalai oleh kepala desa yang merupakan keturunan langsung dari Kyai Abu Mansur. Kendali pemerintahan yang seharusnya dipegang oleh kepala desa dalam pelaksanaannya sendiri masih di bayang bayangi oleh kekuasaan para "*sentana*", dikarenakan belum dihapuskannya golongan *sentana*. Di lingkup tiga desa perdikan kekuasaan *sentana* seakan akan lebih dominan dibandingkan dengan kuasa kepala desa. Terlepas dari peristiwa diatas kegiatan yang paling menonjol didalam wilayah desa perdikan Tawang Sari adalah nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR) dan kyai memiliki hak mutlak atas kegiatan tersebut. Dasar hukum yang dipakai semuanya berdasarkan pada hukum agama. Perkawinan yang dilakukan disebut "*kawin siri*", pernikahan yang diadakan di wilayah perdikan diwajibkan telah memenuhi syarat- syarat Agama Islam namun tidak dilanjutkan ke tahap pencatatan nikah secara administrasi. Para Kyai Sentana memiliki pedoman pada kepercayaan dan kejujuran dari pihak yang berkepentingan melakukan kegiatan nikah, talak, serai dan rujuk (NTCR) tersebut.

Jauh sebelum adanya pembagian desa perdikan Tawang Sari, pelaksanaan pernikahan dilaksanakan di Tawang Sari yang ditangani oleh Kyai Abu Mansur dibantu Kyai Khasan Mimbar selaku sentana Tawang Sari yang bertugas dibidang keagamaan. Bagi setiap masyarakat Islam wilayah Ngrawa yang akan menikah selalu datang ke Tawang Sari. Hal semacam ini diadakan di luar wewenang pemerintah diperoleh sejak zaman keraton Yogyakarta, yaitu kebebasan wewenang untuk mengadakan perkawinan sendiri di wilayahnya terlepas dari pengaruh pemerintah. Dalam praktek pelaksanaan perkawinan tentunya menganut adat perkawinan agama Islam, sehingga harus memenuhi syarat rukun dan sahnya perkawinan, antara lain : adanya calon pengantin dari dua belah pihak, adanya saksi dan wali serta Ijab-Qabul.

Sekitar tahun 1727, atas nama Sunan, Bupati Mangoendirono memberi kuasa kepada Kyai Khasan Mimbar di Tawang Sari untuk melaksanakan hukum nikah dan sebagainya kepada orang- orang yang membutuhkan. Transkrip tersebut berbunyi sebagai berikut :

"*Asesulih ing sun ing sira Dimas Haji Mimbar ing angetrapaken hukum nikah ing wong Majan kang duwe*

¹⁴ D.Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya, Jilid 3 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 17

wali lan kang sing ora duwe wali, la ing talak lan ing fasah lan ing dihar lan ing liyan liyane, lan ing noto, lan ing nikah lan ing akidah, lan ing rujuk lan inghulu lan ing ngaawin, lan ing...., lan ing kene, lan ing zakat, lan ing waris, lan ing tasir kang metu soko perkoro ing kasebut mau kabeh. Amatrapi hukum wong kang ono ing bumi desa kang podo kereh ing adiku mas Haji Mimbar kabeh.

Lan ing ngiwat, serat Ahad 16 Robiul Akhir tahun 1652. Kajobane titi mongso yen ono kawula umay anyuwun nikah keno ora adiku mas Haji Mimbar iyo nglaksani opo kang dadi sran nikahe kawulo lan umat”

Dapat diambil kesimpulan atas *Layang Kekancingan* diatas, bahwa Haji Mimbar sampai pada keturunannya mempunyai hak untuk mengadakan pernikahan sendiri, selain itu juga memegang hukum waris, dan memegang kuasa pemerintahan desa perdikan atas segala urusan hukum agama. Dari isi *Layang Kekancingan*, dapat dipahami adanya wewenang yang dikeluarkan semacam ini hanya untuk memperlancar pekerjaan, karena kenyataannya di desa Perdikan Tawangsari makin berkembang sehingga penduduk yang memiliki urusan dalam hal perkawinan tidak perlu pergi jauh- jauh pergi ke kota kabupaten untuk mengurusnya. Dan kebijakan semacam ini menurut hukum alam dapat diselesaikan di wilayah itu sendiri dengan pemberian legitimasi wewenang dari penguasa.

Semua urusan pernikahan yang terjadi di wilayah perdikan Tawangsari dilakukan sendiri oleh para kyai dianggap sah oleh pemerintahan. Perkawinan yang dilakukan tanpa disertai pencatatan apapun dan didasarkan pada kepercayaan tiga pihak, yakni pihak laki- laki, pihak perempuan dan pihak penghulu. Pelaksanaan kegiatan nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR) yang tidak dilindungi surat-surat sebagai kelengkapan administrasi justru sering disalahgunakan oleh pihak- pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Bagi anggota masyarakat yang berada diluar desa perdikan yang gagal melakukan salah satu kegiatan nikah, talak, cerai dan rujuk, dapat melakukannya di desa perdikan namun memberikan keterangan palsu didepan penghulu. Masalah tersebut semakin lama semakin banyak terjadi sehingga merugikan bagi masyarakat dan pemerintah daerah sehingga muncul tuntutan menuntut dan persengketaan antara pihak pihak yang merasa dirugikan.

Diketahui lebih jelas hal yang salah atau dianggap buruk disini bukanlah dari peraturan pihak desa perdikan melainkan orang- orang atau okum yang menyalahgunakan wewenang tersebut. Bermula dari kesemrawutan tersebut yang banyak menjurus pada efek negatif pemerintah membuat kebijakan untuk menghapuskan sifat perdikan tersebut dan dituangkan dalam Undang- Undang Nomor 13 tahun 1946.

Secara berangsur- angsur pemerintah sadar bahwa adanya hal semacam tersebut di wilayah perdikan merupakan suatu kearifan lokal yang perlu diawasi saja pelaksanaannya. Beberapa dari golongan banyak yang bersembunyi di wilayah perdikan. Tujuannya adalah selama orang- orang di desa perdikan masih dilindungi oleh para kyai maka pemerintah daerah akan mendapat kesulitan dalam menangkap orang- orang tersebut. Dan akhirnya pada tahun 1979 desa perdikan Tawangsari, Majan dan Winong di Tulungagung dapat dihapuskan dengan sempurna dengan cara mufakat dan pembagian tanah yang wajar serta pemberian ganti rugi bagi beberapa orang yang telah kehilangan jabatannya.

Umumnya dalam masyarakat perdikan di wilayah Jawa dikenal dua kaidah dasar kehidupan yaitu : pertama prinsip kerukunan dan kedua prinsip hormat. Prinsip yang kedua adalah prinsip hormat merupakan salah satu bentuk dari cara seseorang dalam membawa diri selalu harus menunjukkan sikap menghargai kepada orang lain sesuai derajat dan kedudukannya. Prinsip hormat didasarkan pada pandangan bahwa segala hubungan dalam masyarakat teratur secara

hirarkis dan merupakan sebuah kesatuan yang selaras sesuai tata karma sosial. Kesadaran akan kedudukan sosial merupakan hal wajib dan penting dalam prinsip rukun dan hormat yang dimiliki masyarakat Jawa. Interaksi sosial yang berlangsung harus menyadari dengan siapa interaksi tersebut berlangsung (unggah- ungguh atau tata krama). Dalam masyarakat Jawa dikenal adanya stratifikasi masyarakat sebagai suatu warisan dari sistem kerajaan (feodalisme).

3. Aspek Ekonomi

Wilayah Jawa merupakan salah satu wilayah yang menghasilkan berbagai macam hasil bumi, sektor pertanian diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan bahan baku dunia industri yang menyebar diberbagai tempat. Misalnya, tembakau dan cengkeh dikirim ke banyak pabrik rokok besar, seperti Malang, Kediri, Tulungagung dan Surabaya. Selain itu juga menjadi komoditas bahan baku dalam pembuatan gula di Tuban, Malang, Bojonegoro dan Jombang.¹⁵

Desa perdikan telah menciptakan suatu bentuk komunitas pedesaan yang sederhana, sawah merupakan sumber utama bagi kehidupan ekonomi. Para ulama yang menjadi panutan disamping mengurus tugas - tugas keagamaan, serta tempat berkonsultasi mengenai permasalahan pernikahan, perceraian dan warisan, juga diikat oleh sebuah kewajiban untuk mengingatkan penduduk desanya tentang musim yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan bercocok tanam.¹⁶ Integrasi antara ulama dengan masyarakat muslim wilayah perdikan menggambarkan mereka sebagai suatu bagian kesatuan, dari kaum petani yang dihormati, berkecukupan dan damai.

Wilayah desa – desa perdikan pada masa Mataram Islam yang keberadaannya berada di sepanjang tepian sungai Ngrowo yang memiliki akses ke Sungai Brantas satu-satunya adalah desa Perdikan Tawangsari yang luas wilayahnya meliputi kecamatan Kedungawaru saat ini. Pusat kegiatan perekonomian masyarakat perdikan berada di sepanjang aliran sungai Ngrowo, sebab wilayah sekitar aliran sungai tersebut merupakan lahan yang subur sebagai tempat bercocok tanam. Terlepas dengan salah satu kegunaannya sebagai pengairan lahan pertanian di wilayah Tawangsari, Sungai Ngrowo juga memiliki peranan sebagai akses untuk membawa gelondongan- gelondongan kayu dari wilayah pegunungan Tulungagung selatan. Mayoritas kayu-kayu tersebut di olah menjadi barang setengah jadi hingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, tempat pengolahan kayu ini letaknya berada disebelah barat desa Tawangsari. Hal tersebut diperkuat dengan adanya penuturan dari Hj. Siti Fatimah:

“Tawangsari adalah desa perdikan, perdikan yang memiliki artian bebas merdeka. Jadi semua urusan yang berkaitan dengan rumah tangga desa serta masyarakatnya diatur sendiri, tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Kegiatan utama perekonomian masyarakat perdikan diperoleh dari hasil panen, sedangkan ditunjang dengan kegiatan perdagangan atau pasar. Salah satu buktinya di sebelah utara pesantren Tawangsari terdapat lahan persawahan yang sampai saat ini masih ada, masyarakat sekarang sering menyebutnya sebagai desa Simo yang berarti tanah sima, dulu merupakan bagian dari desa perdikan Tawangsari. Ketika masa pendudukan Belanda meluas hingga desa perdikan status Tawangsari ini tetap sebagai desa perdikan beserta haknya bebas dari pajak juga tetap diberikan.”

Keberadaan sungai terutama sungai Ngrowo yang posisinya berada ditengah- tengah wilayah Tulungagung. Sungai merupakan sarana transportasi dan saran penunjang kegiatan perekonomian, kegiatan jual beli melalui sungai Ngrowo menuju daerah- daerah yang dilewati sungai Brantas. Kawasan desa di sepanjang sungai selalu menjadi pusat kegiatan perekonomian yang menguntungkan,

¹⁵ R. Bratamidjaja, *Ensiklopedia Indonesia Sari Geografi Edisi Baru Indonesia*, (Jakarta: PT. IKRAR Mandiri Sejahtera, 1999), hlm. 98

¹⁶ Raffles dalam J. Burhanudin, *Ulama dan Kekuasaan Pergumulan Elite Muslim Dalam Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Mizan, 2012), hlm. 89

awalnya para pedanggang asing banyak keluar masuk ke wilayah pedalaman khususnya desa perdikan Tawangsari dan sekitarnya kemudian menetap dan menggarap tanah-tanah persawahan dan kebun. Ketika status desa perdikan Tawangsari belum dihapuskan, penguasaan atas tanah dan lahan pertanian dikuasai oleh para Kyai yang disebut golongan *Sentana* (sistem keturunan), sedangkan bagi masyarakat yang tinggal dan menetap di wilayah perdikan Tawangsari disebut *Magersari*. Setelah status desa perdikan dihapuskan, wilayah kekuasaan perdikan ditiadakan dan lahan pertanian tidak lagi dikuasai oleh para Kyai, dikarenakan berkembangnya pertumbuhan pesantren – pesantren yang bersifat modern di Tawangsari.

4. Aspek Budaya dan Agama

a) Pusat Persebaran Islam di Tulungagung

Proses penyebaran Islam adalah salah satu proses yang cukup penting dalam sejarah di wilayah nusantara. Pedagang muslim sebagai pelopor awal mula berkembangnya Islam di kawasan nusantara, mereka banyak bermukim dan menetap dari masa Hindu-Budha masih mendominasi. Sebelum Islam seutuhnya masuk ke pedalaman pola penyebarannya bersifat halus dan tidak terlihat karena ketika kegiatan jual beli secara tidak sengaja ada interaksi syiar Islam didalamnya. Mulai muncul kerajaan-kerajaan Islam yang memiliki cita rasa lokal yang menjadikan atmosfer Islam yang berbeda di Nusantara. Bukti yang paling dipercaya mengenai penyebaran Islam dengan ditemukannya beberapa prasasti-prasasti Islam yang kebanyakannya dalam wujud batu nisan dan catatan dari para musafir.¹⁷

Dalam Babad Tawangsari dijelaskan bahwa desa Tawangsari berasal dari kata “*Tawang*” dan “*Nagasari*”. Sebelum tanah Tawangsari dibabat atau dibuka untuk dijadikan pemukiman dan pusat penyebaran Islam, Kyai Abu Mansur menemukan sebuah pohon besar yang disebut dengan sebutan pohon tawang yang dikelilingi oleh pohon nagasari. Akhirnya setelah kedua pohon tadi ditebang maka jadilah desa Tawangsari. Pohon tawang yang besar ditbang dan dijadikan menjadi enam potongan untuk dijadikan bedug. Keenam potongan tadi dibagi-bagikan kepada beberapa masjid, antara lain Masjid Tawangsari, masjid Majan, Masjid Wnong, masjid Agung Tulungagung, masjid Jami’ Botoran dan masjid Sumber Bedug Ngadiluwih.

Keberadaan pesantren dalam konteks lokal dikaitkan dengan keberadaan desa perdikan, lembaga *paguron*, dan *padepokan* dengan fungsi keagamaan yang telah ada sejak zaman Pra Islam. Perdikan dipandang sebagai bentuk kesinambungan antara pesantren dengan lembaga keagamaan pra Islam. Khususnya desa perdikan yang berhubungan dengan hak-hak istimewa yang diperoleh berupa pembebasan pajak dan kerja rodi, namun penghasilan harus digunakan untuk menjalankan beberapa fungsi khusus, seperti memelihara makam-makam penting dan memelihara masjid serta pesantren.

b) Pelestarian Tradisi Mataram

Hubungan antara desa atau kademangan Tawangsari dengan Sultan Hamengkubuwana di Yogyakarta tidak sebatas pada pemberian status tanah perdikan, melainkan juga merupakan sebuah ikatan yang didalamnya terdapat kewajiban untuk turut menjaga, memelihara dan mengembangkan tradisi yang berlaku di Keraton Yogyakarta di wilayah-wilayah kekuasaannya yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan. Barang-barang sakral yang dikeramatkan di simpan di perdikan Tawangsari antara lain: pelana kuda bernama Kyai Ngejung, jubah panglima warna biru bernama Kyai Langung, keris bernama Kyai Blorok, pedang bernama Kyai Rampak, bende bernama Kyai Surat, tombak bernama Kyai Dadap, bedil atau senapan yang bernama Kyai Nunngang dan wayang klitik bernama Kyai Pamegatsari alias Jayaningrum, gender dan bonang. Seluruh barang tersebut semuanya berasal dari Keraton Yogyakarta. Selain itu, ada juga pemberian pusaka kepada Khasan

Mimbar yang berwujud golok yang dinamakan sebagai pusaka Kyai Golok. Setiap bulan Maulud dalam penanggalan Jawa diadakan tradisi pemandian pusaka Kyai Golok dengan menggunakan asap dan pembacaan sholawat. Tradisi ini sudah berlangsung secara turun temurun.¹⁸ Tradisi yang dilakukan di desa Tawangsari ini merupakan sebuah bentuk tradisi Islam Kejawen, atau Islam yang terpengaruh oleh proses Mataramisasi dikarenakan wilayah Tulungagung merupakan wilayah dibawah kekuasaan Mataram.

Tradisi lainnya yang masih dipelihara antara lain seni pendalangan dengan gaya Yogyakarta yang diajarkan dalam proses kegiatan sekolah. Dalam bidang seni tari ada tari Royong gaya Prajurit, tari Serimpi dan Bedoyo, Tari Watangan yakni sejenis tari Lawung dan beberapa jenis tarian lainnya. Tarian ritual Jawa lahir dari kebudayaan Jawa yang berkembang yang pusat kebudayaannya itu sendiri berada di keraton, dengan raja sebagai penguasa tunggal. Dalam pandnagan Jawa, raja sebagai pengampu kebudayaan Jawa. Upacara memandikan barang-barang sakral dilakukan juga pada bulan Suro dan air bekas memandikan tersebut menjadi ajang rebutan bagi masyarakat sekitar. Pada bulan Sapar ada upacara memperingati hari desa perdikan Tawangsari dengan membuat gunung berupa tumpeng lengkap dengan perangkat makanan dan ditambah dengan peragaan hasil bumi wilayah perdikan. Tumpeng diarak keliling desa dengan berjalan kaki diiringi dengan barisan “Prajurit Mataram”, kemudian dibacakan doa-doa di Masjid Agung Tawangsari disertai dibacakannya layang kekancingan dari Mangkubumi dilanjutkan diarak menuju balai desa Tawangsari untuk disantap bersama. Di bulan Maulud ada beberapa upacara berupa pembagian tumpeng – tumpeng kecil kepada masyarakat setelah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Tradisi yang berlaku di Tawangsari merupakan keberlanjutan dari tradisi Keraton Yogyakarta yang masih dijaga hingga saat ini. Kebudayaan Jawa pada dasarnya mendapat pengaruh asing antara lain berasal dari, India, Arab dan Barat. Secara berturut-turut pengaruh India membentuk Ideologi Hindu – Budha yang berakulturasi dengan pengaruh Arab yang masuk membawa ideologi Islam yang khas wilayah Indonesia.

PENUTUP

A. Simpulan

Desa Perdiakan Tawangsari adalah wilayah yang bebas merdeka dengan status perdikan *Mutihaan*, merupakan bentuk balas jasa Raja Mataram Islam kepada seorang tokoh yang bernama Kyai Abu Mansur. Pembebasan desa tersebut dari semua pajak dikarenakan jasanya dalam membantu perjuangan Mangkubumi dalam merebut posisi sebagai raja Mataram yang berkedudukan di Yogyakarta. Kedudukan Kyai Abu Mansur diperkuat dengan diberikannya *layang kekancingan* oleh Mangkubumi. Posisi Tawangsari berada di kawasan Mancanegara Wetan dan masuk di dalam kadipaten Ngrowo. Perkembangan wilayah Perdikan Tawangsari terlihat dari berbagai bidang, utamanya dalam urusan perkembangan penyebaran ajaran Islam serta pembangunan pondok-pondok atau padepokan, semakin ramainya para pendatang yang datang ke wilayah Tawangsari, dan adanya Tawangsari menjadi cikal bakal pembangunan kota Tulungagung hingga saat ini. Perkembangan wilayah Tawangsari terlihat jelas pada pertambahan penduduknya yang meningkat secara cepat. Wilayah yang awalnya berupa lahan pertanian di sepanjang aliran sungai Ngrowo berubah menjadi pusat kegiatan keagamaan serta ekonomi yang menjanjikan.

Selain perkembangan serta majunya wilayah perdikan Tawangsari juga memegang peranan penting dalam segala aspek kehidupan diantaranya: dalam bidang sosial kegiatan yang paling menonjol adalah urusan mengenai bab perkawinan yang meliputi nikah, talak, cerai dan rujuk, sehingga memudahkan masyarakat pada masa itu untuk tidak

¹⁷ M. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, (Jakarta Serambi, 2008), hlm. 3

¹⁸ Tim Peneliti, *Bingkai Sejarah Tawangsari dalam Babad Tulungagung*, (Tulungagung: Dimensi Pers, 2000), hlm. 41-43

terlalu membuang biaya yang terlalu mahal untuk sekedar mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Dibidang ekonomi desa Perdikan Tawang Sari yang berada di sepanjang aliran sungai Ngrowo secara otomatis menjadikan lahan pertaniannya subur sehingga merupakan tempat yang cocok dalam bercocok tanam selain itu sungai sebagai sarana transportasi utama masa itu mejadi sarana pertumbuhan ekonomi dalam hal perdagangan, banyak para pedagang asing yang datang untuk melakukan kegiatan ekonomi melewati wilayah Perdikan Tawang Sari dan kadang menetap tinggal disana. Dalam bidang budaya desa Tawang Sari memiliki kewajiban dalam menjaga dan memelihara serta melestarikan tradisi-tradisi yang merupakan turunan dari masyarakat Mataraman. Terakhir dalam bidang agama, wilayah Perdikan Tawang Sari merupakan pusat pendidikan dan pengajaran Agama Islam serta kanuragan di wilayah Ngrowo dan sekitarnya yang terkenal.

Perkembangan wilayah Tawang Sari cakupannya mencapai seluruh kawasan kota Tulungagung pada tahun 1824. Pengaruh para tokoh serta ulama di wilayah ini sangat besar di Kadipaten Ngrowo. Hingga dalam usaha pemindahan serta pembangunan kota Tulungagung melibatkan seluruh masyarakat Tawang Sari dari berbagai lapisan. Kyai Abu Mansur diangkat menjadi penasihat bupati dalam segala pengambilan kebijakan dalam merumuskan peraturan daerah. Tak berhenti sampai disitu pembangunan pondok-pondok pesantren dalam rentang waktu tahun 1824 hingga 1835 terhitung sekitar 15 pondok pesantren dibangun di wilayah tawang sari, semua itu karena respon masyarakat yang besar ingin berguru ditempat Kyai yang berpengaruh masa itu. Pemindahan pusat pemerintahan Ngrowo dari Kalangbret menuju kawasan di sebelah timur kali Ngrowo juga merupakan hasil perundingan antara pihak pemerintah dengan Kyai Abu Mansur serta pihak keraton Yogyakarta. Mulai dari pembangunan beberapa pondok pesantren guna menampung banyaknya para santri yang antusias ingin menimba ilmu, pemindahan pusat kekuasaan Tulungagung, pembangunan infrastruktur pusat kota serta pembangunan masjid besar Tulungagung semuanya tidak lepas dari peran serta masyarakat perdikan Tawang Sari.

Perdikan Tawang Sari mengalami perubahan besar ketika wafatnya Kyai Abu Mansur, yang mengharuskan para pewarisnya memecah wilayah Tawang Sari menjadi tiga bagian agar tidak terjadi perebutan kekuasaan atau semacamnya. Setelah Abu Mansur wafat sekitar 1870 an selang beberapa waktu diadakan pembagian wilayah tersebut, masing-masing diberikan haknya sesuai hukum dan syariat islam. Setelah tahun 1905 pemisahan ketiga desa bekas perdikan Tawang Sari benar-benar sudah selesai dan sah dimata pemerintah. Disusul dengan penghapusan status perdikan yang dilakukan Bupati Tulungagung melalui Surat Keputusan Nomor HK/II/15/79 tanggal 1 Mei 1979. Hingga pencopotan pejabat desa dan penerimaan sertifikat tanah secara resmi yang diterima ketiga desa, menjadikan status desa perdikan hilang dan berubah menjadi desa-desa biasa.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat membahas desa perdikan Tawang Sari ini dalam sisi yang berbeda, misalnya dalam hal pelestarian tradisinya, arsitektur masjid Tawang Sari yang unik atau beberapa rahasia konflik yang terjadi antara desa Tawang Sari. dari setiap aspek mengenai wilayah perdikan Tawang Sari sangat menarik untuk diteliti
2. Bagi masyarakat Tulungagung diharapkan adanya penelitian menjadikan wawasan sejarah lokal daerah mereka sendiri semakin luas. Serta minat dalam membaca sejarah-sejarah klasik semacam ini semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- Layang Kekancingan 1 Kyai Abu Mansur versi terjemahan, diberikan oleh Pakubuwana II dari Keraton Surakarta tanggal 15 Maulud 1672
- Layang Kekancingan 2 Kyai Abu Mansur Aksara Jawa, diberikan oleh Mangkubumi dari Keraton Yogyakarta tahun 1675 Saka atau 1753 Masehi
- Layang Kekancingan 3 Kyai Khasan Mimbar dari Bupati Tulungagung Mangoendirono 16 Rabi'ul Akhir 1652

Buku Dan Artikel

- Bratamidjaja, R. 1999 *Ensiklopedia Indonesia Sari Geografi Edisi Baru Indonesia*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Sehati
- Burhanudin, J. 2012. *Ulama dan Kekuasaan Pergumulan Elite Muslim Dalam Sejarah Indonesia*. Jakarta: Mizan
- Darmawijaya. 2010. *Kesultanan Islam Nusantara*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Eliande, M, Deliar Noer (Ed). 1959. *The Sacred and The Profan*.. Jakarta: CV. Rajawali
- _____. 1987. *Babad Trunojoyo –Suropati*. terj. Balai Pustaka. Jakarta: Balai Pustaka.
- Graaf, H.J. de. 1987. *Puncak Kekuasaan Mataram : Politik Ekspansi Sultan Agung*. Jakarta: Graviti Pers
- Isdojo, R. 1971. *Tulungagung dalam Rangkaian Sejarah dan Babad*. (Tulungagung: Pemerintah Daerah Tulungagung
- Kuntowijoyo. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.
- Lombard, D. 1996. *Nusa Jawa: Silang Budaya*, Jilid 3. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Ricklefs, M. 2008. *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: Serambi
- Suhadi, Machi. 1983. *Status Tanah / Desa Perdikan di Jawa*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
- Widja, Gde. 1989. *Sejarah Lokal suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.